

**ANALISIS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 21
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

MUHAMMAD AFIF ALFIANDA

1410112087

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (PK V)



Pembimbing 1 : Drs. Intizham Jamil S.H., M.H.

Pembimbing 2 : Delfina Gusman S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

ANALISIS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

(Muhammad Afif Alfianda, 1410112087, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018)

ABSTRAK

Peraturan Perundang-undangan yang baik tidak luput dari bagaimana proses pembentukan suatu undang-undang dilakukan dengan cara dan metode yang baku dan standar yang dapat mengikat semua lembaga atau pihak yang berwenang dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan. Dalam mewujudkan negara hukum, tentu diperlukan adanya suatu tatanan yang tertib, salah satunya di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tertib pembentukan suatu peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah harus diaplikasikan sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pengundangannya, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan harus melalui beberapa tahapan, yaitu melalui tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan memuat norma hukum yang mengikat secara umum. Sebagai salah satu contoh peraturan perundang-undangan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Adapun permasalahan yang akan dikemukakan pada skripsi ini, yaitu: Pertama: Bagaimana Analisis Pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Kedua: Bagaimana Politik Hukum Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk dapat memberikan solusi yang lebih baik kedepannya. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Dimana penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data-data sekunder ditambah dengan wawancara. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan tersebut ditemukan bahwa Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah ini, Pertama: tidak melalui tahapan pembentukan yang baik karena pada tahap penyusunan terdapat beberapa pasal yang multitafsir atau kurang jelas sehingga bertentangan dengan asas kejelasan rumusan, selain itu juga bertentangan dengan asas keterbukaan dikarenakan partisipasi masyarakat hanya sekedar ikut pada tahap perencanaan saja. Kedua: dari tahun ditetapkannya Perda ini yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 2018 tidak ada satupun Peraturan Pelaksana yaitu Peraturan Walikota / Peraturan Kepala Daerah yang didelegasikan oleh Perda ini yang telah dibentuk, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penegakkan Perda tersebut.